



DETERMINAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA

Iis Dewi Herawati, Nisa Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, iisdewiherawati12@gmail.com, Universitas Panca Sakti Bekasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, nisalest@gmail.com, Universitas Panca Sakti Bekasi

ABSTRACT

Regional autonomy accommodates regions to carry out regional management in accordance with the needs and priorities set in the current year in all aspects, both physical and non-physical. This makes financial management in the public sector which includes regional revenues and expenditures must be carefully calculated, in addition to local governments also must be able to find sources to fund all needs in the region. Capital Expenditure is an element of the regional budget that is needed and is intended for the revitalization of facilities and infrastructure as well as infrastructure in the region. Revitalization and optimization are expected to occur optimally to achieve more excellent public services in a broad scope, so that effective and efficient governance can take place. This study aims to determine the determinants or factors that affect Capital Expenditures in districts/cities North Sulawesi Province for the 2015-2019 period. Based on the results, it is known that PAD and DAK have a positive effect on capital expenditure, while DAU has a negative effect. The simultaneous effect shows that all variables, namely PAD, DAU and DAK, have positive implications for Capital Expenditures in districts/cities North Sulawesi Province for the 2015-2019 period.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Kebijakan daerah otonomi dengan prinsip desentralisasi telah diberlakukan sejak tahun 2004 diketahui memiliki implikasi pada upaya daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan wilayah dengan asas kemandirian, termasuk kemandirian fiskal (Akbal, 2017). Hal ini dapat terjadi karena otonomi daerah mengakomodasi daerah untuk melakukan pengelolaan wilayah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan pada tahun berjalan pada semua aspek, baik fisik juga non-fisik. Sehingga, pengelolaan wilayah menjadi fokus yang harus dimiliki dan dilaksanakan daerah secara optimal, salah satunya melalui peningkatan sumber daya dan potensi yang dimiliki melalui pengalokasian terhadap anggaran belanja di daerah setempat.

Anggaran belanja daerah merupakan komponen vital yang berperan dalam pembangunan sumber daya di daerahnya, baik SDA maupun SDM, sehingga daerah mampu menunjukkan kemampuan dan kredibilitas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ramadhan & Purnama, 2021). Belanja daerah sendiri dapat diidentifikasi melalui Belanja Operasional dan Belanja Modal. Meskipun terdapat kesamaan pada pola pengaturan dan tujuan akhir, namun secara prinsip terdapat kinerja yang berbeda antara Belanja Operasional dan Belanja Modal, yakni prinsip Belanja Operasional menurut definisi sebagai pembiayaan pada kegiatan yang sifatnya non-investasi selama kurang dari satu tahun, sedangkan Belanja Modal diketahui sebagai pembelanjaan dalam ranah investasi baik aset atau non-aset selama lebih dari satu periode akuntansi (Zulkarnain et al., 2019). Menilik dari kedua aspek mengenai anggaran daerah, diketahui bahwa diperlukan manajemen anggaran daerah yang tepat sehingga semua kebijakan dan target dapat terlaksana dan mampu mendongkrak kesejahteraan daerah.

Belanja Modal sebagai fokus dalam penelitian ini merupakan unsur anggaran daerah yang diperlukan serta diperuntukkan untuk revitalisasi sarana dan prasarana serta infrastruktur di daerah. Revitalisasi dan optimalisasi diharapkan terjadi dengan optimal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang lebih prima

dalam cakupan yang luas, sehingga mampu berlangsung pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini kembali pada prinsip otonomi daerah yang mensyaratkan daerah untuk melakukan semua proses pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan secara mandiri, termasuk manajemen keuangan.

Manajemen keuangan pada sektor publik yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah harus diperhitungkan dengan matang, sehingga disamping penyerapan dilakukan secara maksimal dengan capaian 100% pemerintah daerah juga harus mampu mencari sumber untuk mendanai semua kebutuhan di daerah. Keberagaman antara kebutuhan antara daerah satu dengan lainnya pada aspek manajemen keuangan juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang membutuhkan pendanaan bersumber pada pemasukan daerah. Adapun pemasukan daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sumber, baik sumber yang didapat murni dari pengelolaan aset dan kekayaan di daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari alokasi APBN oleh pemerintah seperti Dana Alokasi Umum & Dana Alokasi Khusus (Dewi, 2019).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya risiko ketimpangan terhadap pemasukan yang bersumber PAD karena bentuk desentralisasi fiskal menyebabkan pemerintah pusat mengatur sebagian pengalokasian APBN untuk pendanaan yang didistribusikan di daerah. Hal ini menyebabkan besar pendanaan bersumber APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah memiliki besaran dan nilai yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan daerah, prioritas pembangunan serta kemampuan daerah yang didasarkan pemasukan menurut PAD, dengan harapan terjadi pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah secara terpadu.

Peningkatan terhadap PAD, DAU dan DAK sebagai pemasukan daerah diketahui mampu meningkatkan alokasi maupun realisasi terhadap *capital expenditure*. Hal ini dapat terjadi karena faktor ketiganya didapat oleh daerah untuk dialokasikan pada pembelanjaan yang bersifat investasi guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Termasuk sumber terdahulu yang sejalan dan mendukung penelitian saya adalah Haryanto (2013) menuliskan jika PAD, DAU dan DAK berdampak pada *capital expenditure*. Eka & Nur (2017) juga mengungkapkan bahwa *capital expenditure* dapat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut secara simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Belanja Modal dapat didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban pemda yang dihitung berdasarkan hasil pengurangan pendapatan dengan pengeluaran untuk memberi manfaat tertentu yang berarti bagi pembangunan daerah melebihi satu tempo akuntansi (Zulkarnain, 2019). Belanja modal dapat diklasifikasikan sejenis aset tetap yang dimiliki oleh daerah, karena keberjalannya tidak sekedar jangka pendek, sehingga mampu berguna dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk mengakomodasi pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjabaran mengenai definisi belanja modal tersebut, dapat diambil kesimpulan jika belanja modal merupakan komponen dari aset daerah yang dianggarkan dan dibelanjakan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerah setempat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diartikan sebagai bagian dari pemasukan daerah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pemasukan menurut pungutan pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan yang telah dikelola sebagai PAD (Rahajeng et al., 2021). PAD dapat diidentifikasi berdasarkan semua sumber yang diterima oleh daerah dan diatur dalam peraturan daerah (perda) setempat, baik yang dikeluarkan oleh walikota atau bupati yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah setempat dan optimalisasi sumber daya. Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa PAD salah satu pemasukan yang didapat oleh hasil perolehan asli pemerintah setempat yang disahkan melalui perda.

Besaran PAD yang diterima oleh pemerintah daerah setempat diketahui dibelanjakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan daerah. Tingginya upaya dalam optimalisasi sumber daya dan pelayanan masyarakat inilah membutuhkan Belanja Modal yang sejalan. Hal ini dapat dijelaskan

karena PAD sebagai sumber pembiayaan dengan pembelanjaan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga Belanja Modal pun dapat turut meningkat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dapat didefinisikan sebagai pemasukan yang diperoleh APBN dengan peruntukan untuk pendanaan operasional pemerintah daerah setempat, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pemerintah daerah (Raviyanti et al., 2017). DAU diklasifikasikan berdasarkan sebagai salah satu sumber utama untuk operasional dengan besaran 80% bagi pemerintah daerah tingkat dua, dan merupakan bagian dengan proporsi terbesar dalam dana perimbangan. Keberadaan DAU dalam hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah berdasarkan kebutuhan, sehingga besaran alokasi dapat berbeda. Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa DAU adalah pendapatan bersumber dari pemerintah daerah yang dianggarkan APBN berfungsi mencapai kesejahteraan melalui pembangunan yang merata, melalui potensi juga kebutuhan yang direalisasikan.

Besaran DAU yang diterima oleh pemerintah daerah setempat juga berperan dalam besaran Belanja Modal. Hal ini dapat dijelaskan karena DAU merupakan pemasukan daerah dengan salah satu bagian dari Dana Perimbangan yang nilainya terhitung tinggi, sehingga menyebabkan munculnya kebijakan pembelanjaan dana yang dilakukan oleh daerah didominasi dari sumber DAU tersebut. Hal ini Belanja Modal pasti meningkat dikarenakan semakin besar kebutuhan daerah yang didanai.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dapat didefinisikan sebagai pemasukan daerah dengan APBN guna pembiayaan kegiatan yang bersifat khusus sebagai salah satu upaya untuk mencapai target pembangunan nasional pada daerah setempat dengan besaran DAK menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan dengan prioritas yang akan dipenuhi, sehingga antara daerah satu dengan lainnya memiliki besaran yang berbeda (Jumiati et al., 2017). Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa DAK merupakan salah satu pendapatan daerah yang bersumber APBN untuk mencapai target nasional dengan besaran sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah setempat.

Besaran DAK yang diterima oleh pemerintah daerah setempat juga berperan dalam besaran Belanja Modal. Hal ini dapat dijelaskan menurut fungsi dan peruntukan DAK untuk peningkatan cakupan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, sehingga semakin tinggi atau beragam prioritas yang ada maka pengalokasian Belanja Modal akan mengalami peningkatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis kausalitas atau *causal effect* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Fokus penelitian adalah membuktikan determinan yang mempengaruhi Belanja Modal (Y) melalui analisis terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3). Jenis *total sampling* adalah sampel penelitannya, sehingga penelitian menyertakan semua kabupaten/kota di Provinsi Sulut terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota. Data sekunder dilakukan dengan data Statistik Keuangan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, periode 2015 hingga 2019. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi nilai minimum, maksimum, rerata, standar deviasi, juga analisis dengan regresi linier berganda dalam pengujian hipotesis penelitian melalui pengujian simultan dengan uji F, pengujian parsial dengan uji t dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besar pengaruh yang diberikan seluruh variabel bebas. Berikut merupakan hipotesis yang disusun dalam penelitian:

H₁: PAD (X1) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019.

H₂: DAU (X2) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019.

H₃: DAK (X3) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019.

H₄: PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan data tabel 1 mengenai distribusi frekuensi variabel PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan Belanja Modal (Y) pada kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara 2015-2019 diketahui bahwa PAD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 65.942.167,87, DAU sebesar Rp 471.662.336,28, DAK sebesar Rp 156.170.869,61, dan BM sebesar Rp 194.966.064,52. Berdasarkan kategori nilai terendah dan tertinggi, diketahui bahwa PAD terendah sebesar Rp 10.521.157 dan yang tertinggi sebesar Rp 402.365.667, DAU terendah sebesar Rp 306.923.904 dan yang tertinggi sebesar Rp 788.240.853, DAK terendah sebesar Rp 50.670.430 dan yang tertinggi sebesar Rp 335.681.084, dan BM terendah sebesar Rp 93.210.598 dan yang tertinggi sebesar Rp 399.836.332.

4.2 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan data pada tabel 2 mengenai uji normalitas variabel PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan Belanja Modal (Y) pada kabupaten/kota Provinsi Sulut 2015-2019 dijelaskan jika hasil penerimaan senilai $0,895 > 0,05$. Artinya seluruh data yang digunakan pada telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga hipotesis analisis regresi linier berganda memenuhi syarat.

4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Data pada tabel 3, diketahui bahwa pada penelitian ini dapat dituliskan persamaan regresi linier berganda dengan hasil berikut:

$$\text{Belanja Modal} = 157601880.746 + 0.510 \text{ PAD} - 0.207 \text{ DAU} + 0.648 \text{ DAK}$$

Persamaan dijabarkan dibawah:

- β_0 dengan nilai konstanta hasilnya 157601880.746 dapat diartikan jika PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) adalah konstan, sehingga Belanja Modal (Y) mengalami kenaikan sebesar 157601880.746 rupiah.
- β_1 yang menunjukkan koefisien regresi X1 sebesar 0.510 dapat diartikan jika PAD (X1) meningkat sebesar Rp 1.000, Belanja Modal (Y) mengalami peningkatan Rp 510.000, melalui asumsi bahwa X2 dan X3 bernilai konstan.
- β_2 yang menunjukkan koefisien regresi X2 sebesar -0.207 dapat diartikan jika DAU (X2) menurun Rp 1.000, Belanja Modal (Y) mengalami penurunan Rp 207.000, melalui asumsi bahwa X1 dan X3 bernilai konstan.
- β_3 yang menunjukkan koefisien regresi X3 sebesar 0.648 dapat diartikan jika DAK (X3) menurun sebesar seribu, Belanja Modal (Y) mengalami kenaikan Rp 648.000, melalui asumsi bahwa X1 dan X2 bernilai konstan.

4.4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien ini bertujuan menganalisis besar pengaruh secara parsial yang diberikan semua variabel bebas oleh variabel terikat. Berdasarkan data pada tabel 4 mengenai hasil analisis koefisien determinasi atau *R square*, diketahui bahwa nilai R^2 dalam penelitian adalah 0,588 atau 58,8%. Artinya variabel bebas yaitu PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) dapat menjelaskan pengaruh 58,8% terhadap Belanja Modal (Y). Besar pengaruh ini menunjukkan bahwa terdapat faktor atau variabel lain yang dapat berperan sebesar 41,2%, namun tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Dana Bagi Hasil.

4.5 Hasil Uji Hipotesis Simultan dengan Uji F

Berdasarkan data pada tabel 5 mengenai hasil uji simultan dengan uji F, nilai signifikansi dalam penelitian adalah $0,000 < 0,05$ serta nilai $F_{hitung} (33,817) > F_{tabel} (2,73)$. Ini berarti seluruh variabel bebas yaitu PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) berpengaruh positif pada Belanja Modal (Y) dan hipotesis diterima, sehingga semakin tinggi nilai PAD, DAU dan DAK secara bersamaan dapat meningkatkan nilai Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Sulut periode 2015-2019.

4.6 Hasil Uji Hipotesis Parsial dengan Uji t

Berdasarkan data pada tabel 6 mengenai uji parsial dengan uji t, dijelaskan jika nilai signifikansi dalam penelitian untuk variabel PAD (X1) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai $(5,827) > t_{tabel} (1,992)$, DAU (X2)

sebesar $0,006 < 0,05$ dengan nilai thitung $(-2,861) > t_{tabel} (1,992)$, dan DAK (X3) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai thitung $(6,396) > t_{tabel} (1,992)$. Ini menunjukkan jika:

- a. PAD (X1) positif terhadap Belanja Modal (Y), makin tinggi PAD berkontribusi dalam meningkatkan Belanja Modal kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019.
- b. DAU (X2) berpengaruh negatif pada Belanja Modal (Y), sehingga makin tinggi nilai DAU berkontribusi dalam menurunkan nilai Belanja Modal dan sebaliknya semakin kecil DAU Belanja Modal semakin meningkat pada kabupaten/kota Provinsi Sulut 2015-2019.
- c. DAK (X3) positif terhadap Belanja Modal (Y), makin tinggi DAK berkontribusi dalam meningkatkan Belanja Modal kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019.

Hasil pengujian regresi linier berganda melalui uji t terbukti bahwa ada pengaruh dari PAD (X1) terhadap Belanja Modal (Y), yaitu positif. Pengaruh tersebut bermakna jika makin tinggi PAD berbanding lurus dengan tingginya besaran Belanja Modal yang dilakukan pemda kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019. Ini menunjukkan PAD memiliki tolak ukur memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan daerah, indikator PAD yang mampu memengaruhi Belanja Modal juga dapat dinyatakan sebagai bentuk kemandirian daerah atas pemenuhan kebutuhan pembelanjaan tanpa bantuan penuh dari pemerintah pusat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rizal (2019) bahwa PAD berimplikasi positif di Kota Langsa serta penelitian Dewi (2019) yang bertempat di Provinsi Sumatera Barat. Nilai PAD dapat dipengaruhi besaran penerimaan menurut retribusi, pajak atau pemasukan lain yang disahkan sebagai PAD menurut perda setempat. PAD dalam penelitian menunjukkan kapasitas dalam melakukan pembelanjaan berdasarkan Belanja Modal yang termasuk belanja aset tetap daerah untuk memenuhi kesejahteraan daerah dan masyarakat di wilayah tersebut.

Hasil pengujian regresi linier berganda melalui uji parsial (uji t) memiliki dampak dari DAU (X2) oleh Belanja Modal (Y), dengan arah yang negatif. Pengaruh tersebut bermakna bahwa semakin tinggi nilai DAU berbanding terbalik dengan rendahnya besaran Belanja Modal yang dilakukan pemda kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019. Pengaruh negatif yang diberikan DAU dapat terjadi karena pengalokasian DAU yang berasal dari APBN memiliki besaran yang berbeda, yakni semakin rendah kemandirian keuangan daerah untuk melakukan optimalisasi kegiatan akan meningkatkan alokasi DAU yang diterima dan sebaliknya (Adyatma & Oktaviani, 2015) Hal ini menyebabkan daerah dengan sumber daya, potensi dan nilai ekonomi fiskal yang tinggi cenderung mendapat DAU dengan nilai rendah, sehingga pengaruh yang diberikan dapat menuju ke arah negatif. Artinya meskipun DAU yang diterima daerah rendah, namun daerah tetap bisa melakukan penyerapan Belanja Modal yang tinggi.

Temuan ini sejalan oleh Mawarni et al., (2013) yang menjelaskan jika DAU berdampak negatif terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Pengaruh ini menunjukkan daerah mampu menutup biaya untuk Belanja Modal melalui sumber penerimaan lain, seperti PAD dan DAK, sehingga rendahnya nilai DAU pada daerah dengan potensi yang kaya dan beragam tetap dapat berpengaruh pada Belanja Modal sekalipun membutuhkan pendanaan yang besar.

Hasil pengujian regresi linier berganda melalui uji parsial (uji t) ada dampak dari DAK (X3) terhadap Belanja Modal (Y), yaitu positif. Pengaruh tersebut bermakna jika makin tinggi DAK berbanding lurus dengan tingginya besaran Belanja Modal yang dilakukan pemda kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa DAK yang dianggarkan melalui APBN oleh pemerintah pusat memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas khusus guna menyokong pembangunan di daerah sesuai asas otonomi daerah. Pendistribusian DAK dengan besaran berbeda yang dialokasikan oleh pusat kepada daerah sesuai kriteria seperti indeks bidang terkait, karakteristik daerah, peraturan perundangan, maupun indeks fiskal netto menunjukkan bahwa DAK telah dibelanjakan sesuai dengan peruntukan untuk pemenuhan prioritas nasional, sehingga seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Utara telah berkontribusi dalam cakupan prioritas kesehatan, pendidikan, pangan, infrastruktur dan kelautan perikanan serta pertanian. Bantuan pendanaan ini diharapkan dapat dimaksimalkan dan diserap 100%, sehingga upaya pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam kebutuhan khusus dapat terlaksana dengan maksimal.

Temuan ini sebanding oleh Rizqiyati et al., (2019) menjelaskan jika DAK sebagai salah satu faktor Belanja Modal di 326 kabupaten/kota di Indonesia serta Pradana & Handayani (2017) yang menjelaskan implikasi DAK mempengaruhi 6 kabupaten di Jawa Timur. Nilai DAK dialokasikan bagi daerah dengan prioritas tertentu diketahui memberi implikasi langsung dalam peningkatan Belanja Modal, dengan harapan seluruh penyerapan DAK dapat dimanfaatkan untuk pembelanjaan aset dan revitalisasi aspek-aspek prioritas di daerah secara maksimal sehingga tujuan pusat untuk pemerataan dan pencapaian target nasional dapat dicapai dengan maksimal.

Pengujian regresi linier berganda melalui uji simultan (uji F) ada pengaruh dari semua variabel bebas yakni PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) simultan terhadap Belanja Modal (Y), yaitu positif. Pengaruh tersebut bermakna jika makin tinggi nilai PAD, DAU dan DAK berbanding lurus dengan tingginya besaran Belanja Modal dilakukan pemda kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil uji koefisien determinasi dengan nilai R^2 sebesar 58,8%, yang bermakna bahwa secara keseluruhan mampu memberikan pengaruh sebesar 58,8% pada Belanja Modal kabupaten/kota Provinsi Sulut 2015-2019.

Penelitian pernah dilalui oleh Juniawan & Suryantini (2018) kabupaten/kota Provinsi Bali serta Nuarisa (2013) pada kabupaten/kota Provinsi Jateng, yang menyatakan pengaruh terhadap Belanja Modal. Ini mengartikan bahwa pemasukan pemda yang bersumber dari PAD, DAU dan DAK secara keseluruhan memberikan implikasi positif terhadap Belanja Modal, semakin tinggi PAD, DAU dan DAK secara keseluruhan menunjukkan peningkatan Belanja Modal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah setempat.

5. KESIMPULAN DAN SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui PAD dan DAK berdampak positif oleh Belanja Modal, DAU memberikan pengaruh negatif. Pengaruh simultan menunjukkan seluruh variabel yakni PAD, DAU dan DAK memberikan implikasi positif terhadap Belanja Modal kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019. Atas dasar tersebut rekomendasi yang bisa diusulkan peneliti yaitu pemda agar dapat memanfaatkan penyerapan PAD, DAU dan DAK untuk melakukan pembelanjaan yang dikeluarkan secara maksimal sesuai indikator, target dan prioritas yang ditetapkan, sehingga keberadaan PAD, DAU dan DAK dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 190-205.
- Akbal, M. (2017). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11(2), 99-107.
- Dewi, E. P. (2019). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 1(4), 8-26.
- Eka, P. Y., & Nur, H. (2017). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3), 867-890.
- Haryanto, S. (2013). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 9(2), 140-160.
- Jumiati, E., Indriani, M., & Darwani, D. (2019). The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, Special Autonomic Funds, and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 90-96.
- Juniawan & Suryantini (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-jurnal Manajemen Unsud*, 7(2), 1255-1281.
- Mawarni, M., Darwanis, D., & Abdulllah, S. (2013). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di

- Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 80-90.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 89-95.
- Rahajeng, A. S., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(1), 30.
- Ramadhan, A., & Purnama, N. I. (2021). Analisis Faktor-faktor Penyebab Defisit Anggaran Penganggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2014. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(1), 79-89.
- Raviyanti, A. A., Rahayu, S., Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi*, 2(2), 243-256.
- Rizal, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74-83.
- Pradana, Y. E., & Handayani, N. (2017). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 865-890.
- Rizqiyati, C., Perdana, H. D., & Setiawan. (2019). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 83-96.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 65-73.